

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DESA (SIPADES) DI DESA DUKUHSARI KECAMATAN JABON KABUPATEN SIDOARJO

Oleh:

Aprillia Hartiningtyas

Ilmi Usrotin Choiriyah, M.AP

Program Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2025

Pendahuluan

Pada saat ini, pemerintah daerah telah menjangkau sampai ke ranah desa. Salah satu intervensi hukum desa yaitu pengelolaan aset desa. Untuk mempermudah pengelola aset desa, pemerintah meluncurkan sebuah aplikasi pengelolaan aset desa yang dinamakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES). Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Daerah (SIPADES) merupakan aplikasi pencatatan administrasi aset desa berbasis website yang bertujuan untuk mengurangi risiko hilangnya aset daerah. Pembuatan aplikasi SIPADES mengacu pada peraturan pengelolaan aset desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan aset desa guna memajukan kesejahteraan dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pemasukan desa.

Desa Dukuhsari yakni salah satu desa yang berada di Kecamatan Jabon dengan memiliki pendapatan yang cukup melimpah, hal ini diperkuat dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan aset desa yang tergolong bervariatif. Untuk mengelola banyaknya aset desa yang dimiliki oleh desa Dukuhsari, sejak tahun 2022 Desa Dukuhsari menerapkan aplikasi SIPADES untuk mengelola aset desa melalui Kaur TU dan Umum.

Berdasarkan pada tabel 1 menjelaskan bahwa banyaknya jumlah aset yang dimiliki oleh Desa Dukuhsari. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2022 aset desa yang dimiliki oleh Desa Dukuhsari sebanyak 177 dan ditahun 2023 dan 2024 sebanyak 190 aset.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Laporan Aset Desa Pada Tahun 2022-2024

Tahun	Banyaknya Aset Desa	Aset Desa Terinput Di Aplikasi SIPADES	Aset Desa Belum Terinput Di Aplikasi SIPADES
2022	177	0	177
2023	190	73	117
*2024	190	0	190

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024



Gap Permasalahan

01

Keadaan sumber daya manusia yang tersedia di Pemerintah Desa Dukuhsari masih belum memadai karena kurangnya pemahaman bagaimana cara mengoperasikan aplikasi SIPADES dengan baik dan benar

03

Belum adanya sosialisasi lanjutan oleh Pemerintahan Daerah Sidoarjo dan Pemerintah Kecamatan Jabon sehingga kurangnya pemahaman perangkat Desa dalam mengoperasikan sistem SIPADES

02

Kurang lengkapnya isi buku inventaris desa serta kurang cepatnya koneksi wifi di Kantor Desa Dukuhsari

04

Aplikasi SIPADES sering mengalami error pada saat jam kerja pegawai

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan empat indikator dari teori implementasi menurut Charles O.Jones (Abidin, 2002:199) dengan 3 variabel : organisasi, interpretasi, dan aplikasi (pelaksanaan pekerjaan)



Penelitian Terdahulu

01

Ediyanto, dkk (2023) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang”. Temuan studi ini yaitu minimnya kapabilitas aparatur desa disebabkan oleh belum adanya bimbingan teknis (BIMTEK) lanjutan.

02

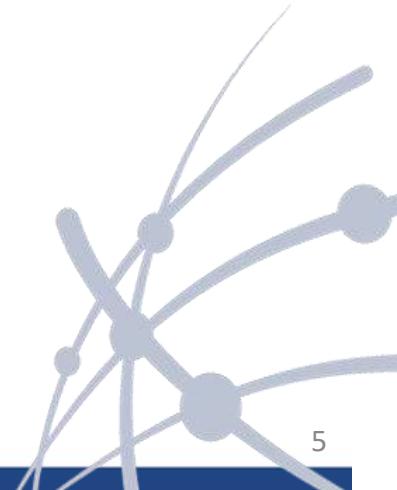
Rachmat Hidayat, dkk (2022) dengan judul “Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa “SIPADES” Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”. Hasil penelitian ini ialah minimnya pembinaan dan pengembangan kompetensi diri dari dinas terkait

03

Bagas Tegar Laksana, dkk (2023) dengan judul “Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)”. Hasil temuan penelitian ini ialah minimnya pelatihan dan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas penerapan aplikasi SIPADES.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?



Metode Penelitian

Jenis Penelitian



Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif



Fokus Penelitian

Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo



Teori Penelitian

Menggunakan teori implementasi menurut Charles O.Jones (Abidin, 2002:199) dengan 3 variable : organisasi, interpretasi, dan aplikasi (pelaksanaan pekerjaan)



Teknik Analisis Data

Menggunakan teknik analisis data dari model interaktif Miles & Huberman (1992:20) yang mencakup tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan



Lokasi Penelitian

Desa Dukuhsari, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo



Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi



Teori Penentuan Informan

Teknik Purposive Sampling



Sumber Data

1. Data Primer
2. Data Sekunder

Hasil dan Pembahasan

1. Organisasi

Pengorganisasian dalam implementasi publik yakni suatu cara dalam menunjukkan lembaga-lembaga, unit-unit, berserta metode yang diperlukan untuk mewujudkan target yang tertulis di dalam kebijakan.

Pada **dimensi struktur organisasi** didapatkan hasil bahwa struktur organisasi dalam Pemerintahan Desa Dukuhsari sudah lengkap terdiri dari berbagai bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Salah satunya pada Kaur TU dan Umum yang memiliki tugas sebagai pengelola aplikasi SIPADES. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Gambar 2. Struktur Desa Pemerintahan Desa Dukuhsari



Sumber: Pemerintah Desa Dukuhsari, 2024

Hasil Dan Pembahasan

Pada **dimensi sumber daya manusia** didapatkan hasil bahwa sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari belum memahami secara keseluruhan mengenai aplikasi SIPADES. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya sosialisasi lanjutan yang diadakan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa Kabupaten Sidoarjo dan Pemerintahan Kecamatan Jabon bagi operator aplikasi SIPADES.

Tabel 2. Pelaksana Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)

Nama	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Pelatihan/Kompetensi
Zumrotul A'yuningsih	SMA	Kaur Tu dan Umum sekaligus operator aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)	Pelatihan pengoperasian aplikasi sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) (Kecamatan Jabon 2023)

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Pada **dimensi sarana dan prasarana** didapatkan hasil bahwa dalam menunjang pelaksanaan aplikasi SIPADES masih terdapat kendala berupa lambatnya koneksi wifi dan kurang lengkapnya isi dari buku inventaris desa



Hasil Dan Pembahasan

2. Interpretasi

Interpretasi ialah indikator yang penting dalam pengimplementasian aplikasi SIPADES karena sebuah kebijakan tidak akan mencapai tujuan jika terdapat perbedaan tafsiran diantara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan.

Pada **dimensi struktur kejelasan** didapatkan hasil bahwa operator aplikasi SIPADES Desa Dukuhsari memahami apa saja tanggungjawabnya namun operator kurang memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugasnya karena operator belajar otodidak .

Pada **dimensi sosialisasi kebijakan** didapatkan hasil bahwa pelaksanaan sosialisasi belum optimal karena belum adanya sosialisasi lanjutan dari Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Sidoarjo serta Pemerintahan Kecamatan Jabon sehingga kurangnya kemampuan operator dalam mengoperasikan aplikasi SIPADES karena pada saat sosialisasi operator SIPADES Desa Dukuhsari sekadar diajarkan rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa sampai ke tahap pengadan serta tidak bisa membuka aplikasi SIPADES pada saat sosialisasi berlangsung.

Tabel 3. Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi SIPADES

Tahun Pelaksanaan	Pelaksana	Peserta Sosialisasi	Materi Sosialisasi
2021	Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo	Eko Setiawan	Pengenalan aplikasi SIPADES
2022	Pemerintahan Kecamatan Jabon	Intan Prihatini	RKP, data perangkat, dan RAPBD
2023	Pemerintahan Kecamatan Jabon	Zumrotul A'yuning sih	Perencanaan dan pengadaan

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Hasil Dan Pembahasan

3. Aplikasi (Pelaksanaan Pekerjaan)

Aplikasi atau disebut sebagai pelaksanaan pekerjaan yakni prosedur yang dinamis dimana para implementor diarahkan sesuai dengan pedoman program dengan prosedur kerja.

Pada **dimensi prosedur kerja** didapatkan hasil bahwa meskipun aplikasi SIPADES telah memiliki SOP namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada operator aplikasi SIPADES. Operator aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari hanya dapat mengikuti prosedur kerja sampai tahap pengadaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mereka mengenai aplikasi SIPADES.

Pada **dimensi kondisi teknis** didapatkan hasil bahwa aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari sering mengalami *error* pada jam kerja pegawai. Hal tersebut dapat menganggu operator dalam memasukkan data aset desa ke aplikasi tersebut.

Gambar 4. Standart Operating Prosedure (SOP) aplikasi SIPADES di Desa Dukuhsari

SOAL LATIHAN SIPADES 2.0 *online*

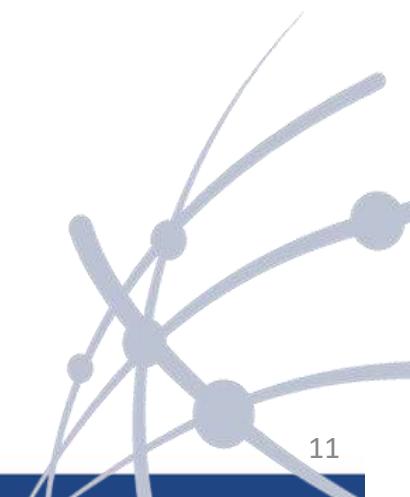
I. DATA PERANGKAT DAN PENGGUNA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
01	Sahrul Santoso	Kepala Desa	
02	Fenny Astuti	Sekretaris Desa	
03	Anggraini Shara	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas/Pengurus Aset Desa
04	Rossa Perer	Kepala Urusan Keuangan	
05	Wulandari	Kepala Urusan Perencanaan	
06	Auliya Hanafi	Kepala Seksi Pemerintahan	
07	Endah Eryanti	Kepala Seksi Kesejahteraan	
08	Titi Bella	Kepala Seksi Pelayanan	
09	Mudi Budiman	Ketua BPD	
10	Rio Ferdinand	Sekretaris BPD	
11	Yulianti	Ketua BPD 1	
12	Hermansyah	Anggota BPD	
13	Hendrik	Staff Kaur Keuangan	
14	Ari Dwiyanti	Staff Kaur TU dan Umum	
15	Susilo	Kadus Turangga	
16	Wawan	Kadus Amarta	

Sumber: Pemerintahan Desa Dukuhsari, 2024

Kesimpulan

Studi mengenai implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Desa (SIPADES) di Desa Dukuhsari menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi pemerintahan desa mendukung pengoperasian aplikasi, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi, koneksi internet yang lambat, serta kurang lengkapnya data inventaris desa. Pemahaman operator terhadap tanggung jawab cukup baik, namun karena pelatihan hanya dilakukan sekali, dibutuhkan sosialisasi lanjutan untuk mengoptimalkan pemahaman. Selain itu, SOP penggunaan aplikasi belum terimplementasi secara optimal, dan aplikasi sering mengalami error akibat keterbatasan kapasitas server.



Referensi

- [1]M. Mukhrizal, A. Fadila, dan et al. Maulani, M P, "Efektivitas Pengelolaan Aset Pengelolaan Rumah Sewa Desa Di Gampong Ceurih Banda Aceh," *TheJournalish Soc. Gov.*, vol. 4, no. 2, hal. 133–145, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/477%0Ahttp://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/download/477/319>
- [2]Mariah Rabiatul Q dan M. Raharso, "Evaluasi Kesuksesan Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)," *J. Manaj. Aset Infrastruktur Fasilitas*, vol. 4, no. 1, hal. 33–42, 2020, doi: 10.12962/j26151847.v4i1.6831.
- [3]Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2014. doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [4]Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa*. 2016. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111552/permendagri-no-1-tahun-2016>
- [5]L. T. Pamungkas et al., "Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo," 2022.
- [6]Presiden Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Presiden*. Indonesia, 2003. [Daring]. Tersedia pada: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/147277/inpres-no-3-tahun-2003>
- [7]H. S. Nugroho, "Implementasi Kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman," *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 3, no. 2, hal. 119–124, 2020, doi: 10.31334/transparansi.v3i2.1150.
- [8]U. A. A. Wawan, "Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas," *Sebi Stud. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, hal. 91–98, 2021, doi: 10.37567/sebi.v3i1.789.
- [9]M. S. Maarif et al., "Application-Based Village Asset Management (Study of the Village Asset Management System (SIPADES) in Candi Sub District) [Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi (Studi Pada Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) Di Kecamatan Candi)]," *UMSIDA Prepr. Serv.*, hal. 1–12, 2024.
- [10]D. Prayitno, "Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap Inventaris Desa," *J. Ilm. Akunt. Manaj.*, vol. 4, no. 2, hal. 78–82, 2021, doi: 10.35326/jiam.v4i2.1300.
- [11]N. U. Aprilia, "Determinan Perceived Usefullness dan Perceived Ease of Use pada Model Penerimaan Teknologi Aplikasi Sipades V.01," Universitas Jember, 2020.
- [12]S. Peraturan Bupati, *Peraturan Bupati Nomor 005 Tahun 2023*. Sidoarjo, 2023. [Daring]. Tersedia pada: http://jdih.sidoarjokab.go.id/#dtRegulation_Pencarian_Peraturan_Bupati_002_202300200004
- [13]L. Agustion, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- [14]G. Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- [15]L. Purwanti, D. S. Ayu, dan Soelchan Arief Effendi, "Pendampingan Penatausahaan Aset Desa Bagi Aparatur Desa Se-Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri," *JPkMN J. Pengabd. Kpd. Masy. Nusant.*, vol. 4, no. 5, hal. 60–65, 2023.



Referensi

- [16] Ediyanto dan M. Indriane, "Analisis Penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Tanjungsari Kabupaten Sumedang," *J. Adm. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 1, hal. 165–171, 2023, doi: 10.55606/jass.v4i1.136.
- [17] Rachmat Hidayat dan Irfan Nursetiawan, "Strategi Pengelolaan Aset Desa Berbasis Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa 'Sipades' Di Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran," *Moderat Jurnal Ilm. Ilmu Pemerintah.*, vol. 8, no. 2, hal. 317–328, 2022, doi: 10.25157/moderat.v8i2.2706.
- [18] B. T. Laksana, "Pengaruh Pelatihan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengetahuan Akuntansi Terhadap Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) se-Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas," *J. Mhs. Enterp.*, vol. 2, 2023, doi: 10.37567/sebi.v3i1.789.
- [19] Saryono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Alfabeta, 2010.
- [20] A. R. Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, 2018.
- [21] R. Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan," *J. Penelitian, Pendidik. dan Pengajaran JPPP*, vol. 3, no. 2, hal. 147–153, 2022, doi: 10.30596/jppp.v3i2.11758.
- [22] C. O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. 1996.
- [23] R. Tasya, H. Purnamasari, dan R. Ramlani, "Implementasi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (Ikm) Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bekasi," *J. Pemerintah. dan Polit.*, vol. 7, no. 3, hal. 42–47, 2022, doi: 10.36982/jpg.v7i3.2317.
- [24] R. U. Styaningsih, N. Destyarini, A. Aryono, dan E. Elisanti, "Implementasi Pengelolaan Kekayaan Milik Desa Sebagaimana yang Diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 5, no. 2, hal. 2205–2224, 2023, doi: 10.37680/almanhaj.v5i2.3478.
- [25] N. F. Rahman, B. Setiyono, dan D. G. Manar, "ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DESA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN SMART VILLAGE (DESA KALISIDI KABUPATEN SEMARANG)," *J. Polit. Gov. Stud.*, vol. 10, no. 1, hal. 1–52, 2023, doi: 10.21608/pshj.2022.250026.
- [26] Rahmatullilah dan A. Suprastiyo, "Implementasi Program Bina Keluarga Lansia (Bkl) Di Kabupaten Bojonegoro," *Agustus*, vol. 5, no. 2, hal. 8–13, 2021.
- [27] J. I. Rasiwan, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Cagar Budaya Di Kota Bandung," *Manifesto*, vol. 2, no. 1, hal. 8, 2023, doi: 10.24198/sosiohumaniora.v14i2.5488.
- [28] B. Nugraha, M. Mafturrahman, A. Elshifa, N. A. Putri, dan S. Fitriani, "Implementation of the Village Asset Management System Policy in Realizing Good Governance in Pekalongan Regency," *Publica J. Pemikir. Adm. Negara*, vol. 14, no. 2, hal. 159–168, 2022, doi: 10.15575/jpan.v14i2.21155.
- [29] Adriansyah, M. B. Alexandri, dan M. Halimah, "Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung," *Responsive*, vol. 4, no. 1, hal. 13, 2021, doi: 10.24198/responsive.v4i1.34108.
- [30] E. Efriansyah, "Penerapan E-Government Di Desa Sungai Baru Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir," Universitas Islam Riau, 2022. [Daring]. Tersedia pada: <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17101%0Ahttps://repository.uir.ac.id/17101/1/207321008.pdf>



